

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adi, Rianto., *Metodologi Penelitian sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Hatta, Mohammad, H, SH., Mkn., *Hukum Tanah Nasional Dalam Perspektif Negara Kesatuan*, Media Abadi, 2005.
- Harsono, Boedi, Prof., *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Maulani, Z. A, et.al., *Vademecum Transmigrasi*, Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jendral departemen Transmigran, Jakarta, 1992.
- Muljadi, Kartini., Gunawan Widjaja., *Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Pound, Roscoe, *An Introduction to Philosophy of Law*, New Heavnyale University Press, 1961.
- Santoso, Urip, SH., MH., *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Salihedo, John., *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Sutedi, Adrian, SH., MH., *Politik Dan Kebijakan Hukum Pertahanan Serta Berbagai Permasalahannya*, BP. Cipta Jaya, Jakarta, 2006
- Sutedi, Adrian, SH.,MH., *Pengakuan Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria*, BP. Cita Jaya, 2006.
- Swarsono, Sri-edi., Singarimbun Masri., *Sepuluh Windhu Transmigrasi Di Indonesia 1905-1985*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1985.

C. Peraturan PerUndang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen ke 4).
- Undang-Undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 1978.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep: 208/MEN/X/2004 tentang Tata Cara Penetapan Sebagai Transmigran.

Keputusan Direktur Jendral Mobilitas Penduduk Nomor : KEP. 42/MP/VI/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep: 208/MEN/X/2004 tentang Tata Cara Penetapan Status Transmigran.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor : KEP.595/300/PKTP/NAKERTRANS tentang Pencabutan Status Transmigran.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor : KEP.595/308/PKTP/NAKERTRANS tentang Penetapan Transmigran Pengganti.

Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi Nomor : KEP.595/308/PKTP/NAKERTRANS tentang Penetapan Status Transmigran.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan tanah Bagi Kepentingan Umum.

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.